

**PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH**
(Studi Empiris Pada Kab/Kota di Sumatera Barat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang



Oleh :

FANDI AKBAR
2007 / 88772

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

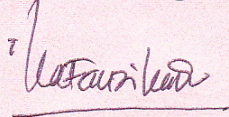
**PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Empiris Pada Kab/Kota di Sumatera Barat)**

Nama : Fandi Akbar
NIM/BP : 88772/2007
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, 16 Januari 2012

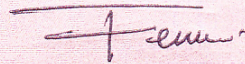
Disetujui Oleh:

Pembimbing 1



Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak
NIP. 19710522 200003 2 001

Pembimbing 2



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19720213 199903 1 003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi

Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Judul : Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Daerah. (*Studi Empiris Pada Kab/Kota di Sumatera
Barat*)

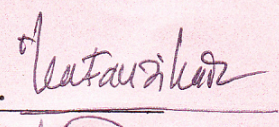
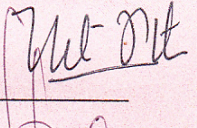
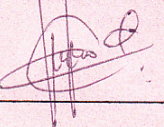
Nama : Fandi Akbar

BP/NIM : 2007/88772

Fakultas : Ekonomi

Padang, 16 Januari 2012

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak	1. 
2. Sekretaris	: Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak	2. 
3. Anggota	: Nelvirita, SE, M.Si, Ak	3. 
4. Anggota	: Charoline Cheisviayanny, SE, M,Ak	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fandi Akbar
NIM/Thn. Masuk : 88772/2007
Tempat/Tgl Lahir : Selayo / 07 Maret 1989
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jln. Gunung Pangilun No 41 D.
No. Hp/Telepon : 08992691812
Judul Skripsi : Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kab/Kota di Sumatera Barat

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis atau skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis atau skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima Sanksi Akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis atau skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Januari 2012

Yang Menyatakan



Fandi Akbar
NIM: 88772

ABSTRAK

Fandi Akbar (2007/88772) Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada Kab/Kota di Sumatera Barat. Skripsi. Universitas Negeri Padang. 2012

Pembimbing I : Eka Fauzihardani, SE, MSi, Ak

Pembimbing II : Fefri Indra Arza SE, MSc, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji 1) pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, dan 2) pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada pemerintahan

Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah staf akuntansi pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara *judgment sampling*, dengan jumlah responden 107 orang. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuesioner kepada responden yang bersangkutan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda dengan bantuan *Statistical Package For Social Science* (SPSS).

Kesimpulan penelitian menunjukkan: 1) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dengan nilai signifikan sebesar $0,026 < \alpha 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 2,274 > t_{tabel} 2,185$. Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai positif yang berarti H_1 diterima, dan 2) penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dengan $0,000 > \alpha 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 4,209 > t_{tabel} 2,185$. Nilai koefisien β dari variabel X_2 bernilai positif yaitu 0,253 yang berarti H_2 diterima.

Saran dalam penelitian ini adalah: 1) Bagi instansi pemerintah sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern dalam pembuatan laporan keuangan agar kualitas laporan keuangan dari pemerintah dapat terus ditingkatkan. 2) untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah, dapat disertai dengan penelitian kualitatif dan pergantian sampel penelitian, serta dilakukan perubahan dalam pemilihan alternatif jawaban pada kuesioner penelitian.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur Penulis ucapkan pada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya dengan membukakan mata hati dan fikiran penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata Satu pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih terutama kepada Ibu Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak selaku pembimbing I, dan Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis selama ini. Selain itu, tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

4. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, yang telah membantu dalam kelancaran Administrasi dan perolehan buku-buku penunjang skripsi.
5. Ayah dan ibu, Kakak dan seluruh Keluarga Besar Penulis yang telah memberikan do'a, perhatian, dan kasih sayang serta pengorbanan dan bantuan baik secara moril maupun materil untuk menyelesaikan studi dan skripsi ini.
6. Teman-teman di Fakultas Ekonomi angkatan 2007 yang banyak memberikan saran, bantuan dan dorongan moril kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk semua pihak yang telah membantu penyelesain skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis mengharapkan saran maupun kritik dari pembaca guna kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Padang, Januari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Pembatasan Masalah	11
D. Perumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN TEORI	15
A. Landasan Teori	15
1. Laporan Keuangan Pemerintah	15
a. Pengertian Laporan Keuangan	15
b. Tujuan Laporan Keuangan	16
c. Komponen Laporan Keuangan	18
d. Kualitas Laporan Keuangan	20

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi	26
a. Pengertian Teknologi informasi.....	26
b. Pengertian Pemanfaatan Teknologi Informasi	27
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	33
a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern.....	33
b. Tujuan Sistem Pengendalian Intern	33
c. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern	34
B. Penelitian Relevan	37
C. Hubungan Antar Variabel.....	39
D. Kerangka Konseptual	44
E. Hipotesis Penelitian	46
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Populasi,Sampel dan Responden	47
C. Jenis Dan Sumber Data	49
D. Metode Pengumpulan Data	50
E. Variabel Penelitian	50
F. Pengukuran Vaariabel.....	51
G. Instrumen Penelitian	51
H. Uji Validitas Dan Reliabilitas	53
I. Hasil Uji Coba Instrumen	54
J. Model dan Teknik Analisis Data	54
K. Definisi Operasional	58

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Sampel Dan Responden Penelitian	60
B. Analisis Deskriptif	61
C. Hasil Uji Validitas Dan Reabilitas	73
D. Hasil Uji Asumsi Klasik	75
E. Hasil Analisis regresi Berganda	79
F. Uji Model	81
G. Uji Hipotesis.....	83
H. Pembahasan	84
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Keterbatasan	91
C. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Opini BPK Pada LKPD Prov. Sumatera Barat	9
2. Jumlah SKPD Kab. Solok, Kota Solok, Kota Padang.....	49
3. Daftar Skor Jawaban Pernyataan Berdasarkan Sifat.....	51
4. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	52
5. Nilai Cronbach's Alpha & Corrected Item Total Correlation	54
6. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	60
7. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	61
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Bidang Keahlian Yang Ditempuh	63
9. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	64
10. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja	64
11. Statistik Deskriptif	65
12. Distribusi Frekuensi Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi	67
13. Distribusi Frekuensi Variabel Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	69
14. Distribusi Frekuensi Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	71
15. Nilai Cronbach's Alpha Penelitian	73
16. Nilai Corrected Item Total Correlation Penelitian.....	74
17. Uji Normalitas	76

18. Uji Multikolinearitas	77
19. Uji Heteroskedastisitas	78
20. Koefisien Regresi	79
21. Uji F Hitung	81
22. Uji Koefisien Determinasi	82

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar Bentuk Informasi	27
2. Gambar Kerangka Konseptual.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner Penelitian	94
2. Hasil Analisis Validitas dan Reliabilitas Pilot Tes	103
3. Hasil Analisis Validitas dan Realibilitas Penelitian	109
4. Statistik Deskriptif	113
5. Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas	114
6. Analisis Regresi Berganda	115
7. Uji Koefisien Determinasi.....	115
8. Uji F.....	116

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Salah satu ketetapan MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia merupakan landasan dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dan daerah sebagai penyelenggaraan otonomi daerah.

Seiring dengan terus bergulirnya reformasi di bidang keuangan negara dan pelaksanaan otonomi daerah, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar reformasi dibidang keuangan pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang diinginkan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan. Pemerintah sudah seharusnya meningkatkan kualitas laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang dibutuhkan berbagai pihak. Peningkatan kualitas laporan keuangan dimaksudkan agar dapat meningkatkan kredibilitasnya, menyajikan informasi yang lengkap dan sesuai dengan

kebutuhan pemakai, dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 32 ayat (1), menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Sesuai yang diungkapkan dalam PP No. 24 Tahun 2005, laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi empat karakteristik. Karakteristik pertama, dapat dipahami yaitu informasi yang disajikan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan, Karakteristik kedua, relevan sangat berarti untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Karakteristik ketiga, keandalan mengandung arti bahwa informasi seharusnya bebas dari kesalahan yang material dan bias, serta dapat menyajikan informasi

kepada pengguna secara jujur. Karakteristik keempat dapat dibandingkan, mengandung arti bahwa pemakai laporan dapat membandingkan laporan keuangan antar periode.

Namun demikian, perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum, laporan keuangan menggambarkan pengaruh dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan adalah informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Harus disadari bahwa ada banyak pihak yang akan menggunakan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Mardiasmo (2002:168) mengidentifikasi sepuluh pemakai laporan keuangan pemerintah, Yaitu: (1) pembayar pajak (*tax payer*), (2) pemberi bantuan (*grantors*), (3) investor (4) pengguna jasa (*fee-paying service recipients*), (5) karyawan/ pegawai, (6) pemasok (*vendor*), (7) dewan legislatif, (8) manajemen, (9) pemilik (*vetors*), (10) badan pengawas (*oversigh badies*). Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai.

Dewasa ini, perkembangan teknologi mengiringi pemanfaatan yang lebih baik akan informasi, dengan kata lain untuk menciptakan informasi yang lebih akurat, relevan, dan reliabel diperlukan sebuah teknologi yang mampu memberikan kejelasan sasaran informasi yang disampaikan. Menurut Jurnal dan Supomo (2002:214) salah satu manfaat dari teknologi informasi dapat menciptakan laporan keuangan yang terintegrasi sehingga laporan keuangan tersebut dapat diandalkan. Sistem akuntansi sebagai suatu sistem informasi yang menghasilkan laporan keuangan membutuhkan manusia untuk menjalankan sistem yang ada. Selain itu pemanfaatan teknologi informasi juga dapat dihubungkan dengan upaya untuk meningkatkan kinerja.

Penggunaan teknologi informasi dapat dijadikan media evaluasi berkaitan dengan dua aspek dalam organisasi yaitu aspek manfaat dan aspek kesesuaian antara teknologi dengan tugas. Penggunaan teknologi informasi dalam organisasi diharapkan mampu mempengaruhi sikap dan faktor situasional dalam organisasi yang mengarahkan pemakai untuk memanfaatkan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan kinerja individu maupun organisasi dalam menyusun laporan keuangan.

Menurut Gazali, (2004) dalam Sidik, (2008) mengemukakan keunggulan dari teknologi informasi, sebagai berikut: (a) Tepat waktu dan akurat yang berarti dengan penggunaan sistem informasi berbasis komputer maka hasil outputnya dalam bentuk informasi dapat disajikan tepat waktu dan data yang didapat akurat (b) Untuk mempermudah pengambilan keputusan.

(c) Digunakan untuk berbagai integrasi (d). Memperoleh informasi yang kompetitif (e). Informasi yang bermanfaat (f) Penyajian data cepat.

Penjelasan tersebut menggambarkan keunggulan dari pemanfaatan teknologi informasi yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, karena laporan keuangan yang berkualitas seperti yang dijelaskan dalam PP nomor 24 mengharuskan laporan keuangan tersebut handal, dapat dibandingkan, tepat waktu, dan akurat yang mana keempat kriteria laporan keuangan yang berkualitas tersebut dapat dicapai melalui pemanfaatan teknologi dengan baik seperti yang dijelaskan oleh M. Gazali (2004) mengenai keunggulan dari pemanfaatan teknologi informasi. Hal tersebut menggambarkan pentingnya pemanfaatan teknologi, karena dengan adanya teknologi data-data yang digunakan dalam pembuatan laporan keuangan lebih mudah disusun, hal ini menunjukkan adanya hubungan yang erat dari pemanfaatan teknologi dalam menciptakan kualitas laporan keuangan yang baik.

Dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 dijelaskan bahwasanya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan juga diperlukan sebuah sistem pengendalian. Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Sementara itu dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2008, pengertian Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Aren (2008:370) mengungkapkan tujuan dari SPIP antara lain menciptakan keandalan laporan keuangan, integritas pelaporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasional, dan ketaatan pada hukum serta peraturan. Sedangkan dalam PP No 60 Tahun 2008, tujuan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah: 1.Memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah. 2.Keandalan pelaporan keuangan. 3.Pengamanan aset negara. 4.Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Secara garis besar teknologi informasi dan penerapan SPI dalam pengelolaan keuangan pemerintah sangat memberikan kontribusi yang besar dalam menciptakan laporan keuangan yang handal. Namun fenomena yang berkembang saat ini terlihat laporan keuangan yang menjadi alat pertanggungjawaban kepada publik begitu mengecewakan, terlihat banyaknya daerah yang mendapatkan hasil pemeriksaan laporan keuangan *desclaimer*, dan WDP, dan dapat dilihat sedikit sekali daerah yang mendapatkan hasil audit dengan pendapat WTP. Hal ini menjadi tanda tanya, karena jika kita

bandingkan dengan adanya pemanfaatan teknologi di pemerintah dan penerapan SPI seharusnya laporan keuangan mendapatkan pendapat audit sangat memuaskan.

Salah satu upaya konkritnya adalah penyampaian laporan keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Selain itu dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) untuk laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 BPK menemukan 26 item kegiatan yang memboroskan uang negara, di antaranya belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan yang memboroskan keuangan negara Rp 38,7 milyar dan belum dipertanggungjawabkan. Terdapat tujuh pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta belanja modal senilai Rp 8,260 milyar yang dilakukan melalui penunjukan langsung, dan terdapat biaya jasa listrik, air dan telepon di Dinas Pendidikan Sumatera Barat lebih tinggi dari pemakaian sebenarnya sehingga mengakibatkan kerugian negara Rp 481,39 juta (sumber: Tempo Interaktif 17 Juli 2008).

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Jika kita tinjau ulang, pada Tahun 2004, hanya beberapa daerah saja di pemerintah Kota Padang yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WTP) yaitu sebesar 7 persen, Tahun berikutnya menjadi 5 persen, kemudian pada Tahun 2006 dan 2007 masing-masing hanya tinggal 1 persen. Sebaliknya, laporan keuangan dengan opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) justru meningkat, 2 persen

pada Tahun 2004 menjadi 17 persen pada Tahun 2007. Persentase LKPD yang mendapat opini Tidak Wajar (TW) yang merupakan nilai terendah, juga naik dari 4 persen menjadi 19 persen. LKPP dan LKPD yang terus memburuk menggambarkan bahwa hampir belum terdapat kemajuan dalam peningkatan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas Pelaksanaan Belanja Daerah Kota Solok Tahun anggaran 2008 dan 2009 masih banyak terdapat kecurangan- kecurangan yang dilakukan pemerintah daerah Kota Solok terhadap anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pada Tahun anggaran 2008 dari Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp141.999.032.388,79 dengan realisasi hanya sebesar Rp125.630.096.962,50 atau 88,47%. Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp194.489.384.391,50 dengan realisasi sebesar Rp162.849.540.744,30 atau 83,73 %. Pada Tahun anggaran 2009 dari Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp182.733.115.115,07 dengan realisasi sebesar Rp106.128.561.164,24 atau 58,08%. Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp190.202.952.898,00 dengan realisasi sebesar Rp97.475.647.704,00 atau 51,25%.

Dari hasil penelaahan Sistem Pengendalian Intern diketahui masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan dan prosedur yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran yaitu beberapa pengadaan barang/jasa diatas Rp100.000.000,00 yang seharusnya dilakukan dengan metode pelelangan umum masih dilakukan dengan metode penunjukan langsung maupun pemilihan langsung, terdapat beberapa

penyelesaian pekerjaan yang terlambat dan belum dikenakan denda keterlambatan, kemahalan harga, pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum didalam kontrak, masa berlaku jaminan pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan, dan kekurangan pekerjaan fisik.

Dalam penelitian yang akan dilakukan, yang menjadi objek penelitian adalah instansi pemerintah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat . Dari tahun 2007-2010 masih banyak Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian hal ini memperlihatkan masih adanya penerapan SPI yang kurang dilaksanakan dan kurangnya pemahaman terhadap teknologi yang digunakan. Berikut data IHPS Prov. Sumatera Barat dari tahun 2007-2010.

Tabel 1
Opini BPK Pada LKPD Prov. Sumatera Barat 2007- 2010

No	Entitas Pemerintah Daerah	Opini Tahun 2007	Opini Tahun 2008	Opini Tahun 2009	Opini Tahun 2010
1	Prov. Sumatera Barat	WDP	WDP	TMP	WDP
2	Kab. Agam	WDP	WDP	WDP	WDP
3	Kab. Dharmasraya	WDP	WDP	WDP	WDP
4	Kab. Kepulauan Mentawai	WDP	WDP	WDP	WDP
5	Kab. Lima Puluh Kota	WDP	WDP	WDP	WDP
6	Kab. Padang Pariaman	WDP	WTP	WDP	WDP
7	Kab. Pasaman	WDP	WDP	WDP	WDP
8	Kab. Pasaman Barat	TMP	TMP	TMP	WDP
9	Kab. Pesisir Selatan	WDP	WDP	WDP	WDP
10	Kab. Sijunjung	TMP	WDP	WDP	WDP
11	Kab. Solok	WDP	WDP	WDP	WDP
12	Kab. Solok Selatan	TMP	TMP	TMP	TMP
13	Kab. Tanah Datar	TMP	WDP	WTP	WDP

14	Kota Bukittinggi	WDP	WDP	WDP	WDP
15	Kota Padang	WDP	WDP	WDP	WDP
16	Kota Padang Panjang	WDP	WDP	WDP	WDP
17	Kota Pariaman	WDP	WTP	WDP	WDP
18	Kota Payakumbuh	WDP	WDP	WDP	WDP
19	Kota Sawahlunto	WDP	WDP	WDP	WDP
20	Kota Solok	WDP	WDP	WDP	WDP

Sumber www.bpk.go.id

Data diatas memperlihatkan pada tahun 2007 dari 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat tidak satupun daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian, secara umum pemerintah daerah mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian yakni sekitar 79 % dan sisanya 21 % lagi mendapatkan opini *Disclaimer*. Pada tahun 2008, 10.5 % daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian yaitu Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman dan hanya daerah Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Solok Selatan yang mendapatkan opini *Disclaimer* dan selebihnya daerah mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian. Pada tahun 2009, opini Wajar Tanpa Pengecualian hanya diperoleh Kabupaten Tanah Datar, dan hanya daerah pasaman barat dan kabupaten solok selatan yang mendapatkan opini *Disclaimer*, dan selebihnya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian. Pada tahun 2010 tidak satupun daerah yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Daerah yang mendapatkan opini *Disclaimer* hanya Kabupaten Solok Selatan, selebihnya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian.

Berdasarkan fenomena dan tabel diatas maka yang menjadi objek penelitian ini adalah Kota Padang, Kota Solok, dan Kabupaten Solok, alasan

pemilihan daerah tersebut dikarenakan hasil pemeriksaan laporan keuangan pada tiga daerah tersebut memiliki kesamaan, yakni mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian. Dapat kita lihat pada tiga daerah tersebut tidak adanya peningkatan penilaian opini dari BPK, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada tiga daerah tersebut.

Penelitian Ratih (2010) yang meneliti mengenai Pengaruh Penerapan *Good Governance (GG)* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Good Governance (GG)* dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah.

Penelitian yang dilakukan Celviana (2009), yang meneliti tentang pengaruh sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi pada pemda subosukawonosraten. Hasil penelitian menunjukan bahwa sumber daya manusia berpengaruh signifikan negatif terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.

Permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya menggambarkan kurangnya tingkat pemahaman dan pemanfaatan teknologi dan SPI di

pemerintah, dimana hasil audit dari laporan pertanggungjawaban pemerintah sangat jarang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, padahal audit yang dilakukan oleh BPK didasarkan pada standar akuntansi pemerintah dan melihat penerapannya SPI dipemerintahan yang telah ditetapkan secara nasional. Atas dasar pemikiran diatas, penulis sangat tertarik untuk menguji bagaimana **Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diketahui terdapat berbagai permasalahan. Untuk itu penulis mengemukakan masalah yaitu:

1. Sejauhmana pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah?
2. Sejauhmana pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah?
3. Sejauhmana kriteria kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap pelaporan keuangan pemerintah?
4. Sejauhmana laporan keuangan pokok pemerintah telah relevan,andal,dapat dibandingkan dan dapat dipahami?

C. Pembatasan masalah

Untuk lebih memfokuskan permasalahan serta data yang dibahas dan dikumpulkan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi pembahasan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern

pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pada instansi Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat yaitu pada pemerintah

D. Perumusan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Sejauhmana pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah?
2. Sejauhmana sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumuskan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris:

1. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Instansi Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat
2. Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada Instansi Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.

F. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan dalam kegiatan pelaporan keuangan daerah.
3. Bagi akademis, penelitian ini bisa memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan sebagai referensi untuk diteliti lebih lanjut di lingkungan Akademika.
4. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan referensi yang akan mengadakan kajian lebih luas dalam bahasan ini.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. KAJIAN TEORI

1. Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006, Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara dan Daerah selama suatu periode. Sedangkan Bastian (2006:247) mendefenisikan laporan keuangan adalah representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Mardiasmo (2002:161) tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:

1. Kepatuhan dan Pengelolaan (*Compliance and Stewardship*)

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*Accountability and Retrospective Reporting*)

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (*Planning and Authorization Information*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

4. Kelangsungan Organisasi (*Viability*)

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.

5. Hubungan Masyarakat (*Public Relation*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

6. Sumber Fakta dan Gambaran (*Source of Facts and Figures*)

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (2005:56) Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.

2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait.

c. Komponen Laporan Keuangan

Dalam PP No 8 Tahun 2006 laporan keuangan pemerintah pusat/daerah setidak-tidaknya terdiri dari:

1. Laporan realisasi anggaran

Menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya.

2. Neraca

Menyajikan aset, utang, dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

3. Laporan arus kas

Menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas non anggaran yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5. Laporan Operasional

Menyajikan ikhtisar sumber daya ekonom yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

d. Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Namun demikian, perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum, laporan keuangan menggambarkan pengaruh dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

Menurut Soewardjono (2005), merumuskan kualitas spesifik pelaporan keuangan dalam dua kategori yaitu kualitas primer beserta unsur-unsurnya dan sekunder. Kualitas primer terdiri atas kerelevanan atau keberpautan atau relevansi (*relevance*) dan keterandalan atau reliabilitas (*reliability*), dan ketepatan penyimbolan (*representational faithfulness*). Unsur keberpautan adalah nilai prediktif, nilai balikan, dan ketepatanwaktuan. Sedangkan unsur keterandalan adalah keterujian atau verifiabilitas (*verifiability*). Kualitas sekunder adalah keterbandingan (*comparability*), ketaatasasan atau konsistensi (*consistency*) dan kenetralan atau netralitas (*neutrality*).

Jonas dan Blanchet (2000), menambahkan bahwa informasi keuangan bermanfaat dalam pengambilan keputusan selain relevan dan andal sebaiknya juga memiliki kejelasan (*clarity*) dalam arti dapat dimengerti atau dipahami yaitu apakah informasi keuangan jelas, padat, ringkas, dan memadai. Demikian juga dengan informasi yang memiliki nilai prediksitergantung kepada bagaimana informasi tersebut dapat menyajikan pendapatan yang tidak normal atau tidak biasa dengan diharapkan secara tepat dapat ditaksir pada periode berikutnya. Penyajian informasi keuangan seperti itu disebut sebagai *earning persistence*. Selain itu nilai prediktif informasi keuangan juga tergantung bagaimana informasi tersebut dapat digolongkan sesuai bisnis perusahaan, sehingga investor dapat mengetahui prospek

perusahaan bersangkutan. Selanjutnya informasi keuangan tersebut tergantung pada kelengkapannya.

Dalam PP Nomor 24 tahun 2005, kualitas laporan keuangan tersebut dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan tersebut. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik tersebut hampir sama dengan karakteristik laporan keuangan yang tercantum dalam PSAK tahun 2004. Berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki menurut PP Nomor 24 Tahun 2005:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan, apakah informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan:

a. Memiliki manfaat umpan balik (*Feedback Value*)

Kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam mengkonfirmasi dan mengoreksi harapan-harapan

pemakai masa lalu. Dimana nilai balikan merupakan kemampuan informasi untuk dijadikan basis mengevaluasi apakah keputusan-keputusan masa lalu adalah tepat dengan datangnya informasi tersebut.

b. Memiliki manfaat prediktif (*Predictive Value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. Dimana nilai prediksi merupakan kemampuan informasi dalam memperbaiki kemampuan atau kapasitas pembuat keputusan untuk melakukan prediksi. Hendriksen dan van Berda (1992, hlm.135) mendeskripsikan nilai prediksi atas dasar bagaimana informasi membantu proses prediksi.

c. Tepat Waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. Hendriksen (2000) menyatakan ketepatan waktu mengimplikasikan bahwa laporan keuangan seharusnya disajikan pada suatu interval waktu, untuk menjelaskan perubahan dalam perusahaan yang mungkin mempengaruhi pemakai informasi dalam membuat prediksi keputusan. Ketepatan waktu informasi akuntansi menurut Hendriksen (1992) mengenai karakteristik kualitatif informasi akuntansi, dikatakan informasi akuntansi harus tersedia bagi

pengambil keputusan sebelum kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi (*Verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2. Pemanfaatan teknologi informasi

a. Teknologi informasi

1) Teknologi

Menurut Jogiyanto (7:1995) teknologi merupakan alat yang digunakan individu dalam penyelesaian tugas mereka. Dalam konteks sistem informasi, teknologi terkait dengan sistem komputer (perangkat lunak perangkat keras, data) dan penggunaan jasa penggunaan (*training*, misalnya) yang memberikan panduan penggunaan dalam penyelesaian tugas.

Komputer telah mengganti teknologi manual dengan menggunakan pemrosesan atas data yang jumlahnya sangat besar, ataupun menjalankan pekerjaan yang sangat kompleks. Komputer juga dapat bekerja sangat konsisten serta *reliable* (dapat dipercaya) dalam waktu yang lebih cepat bila dibandingkan dengan kemampuan manusia.

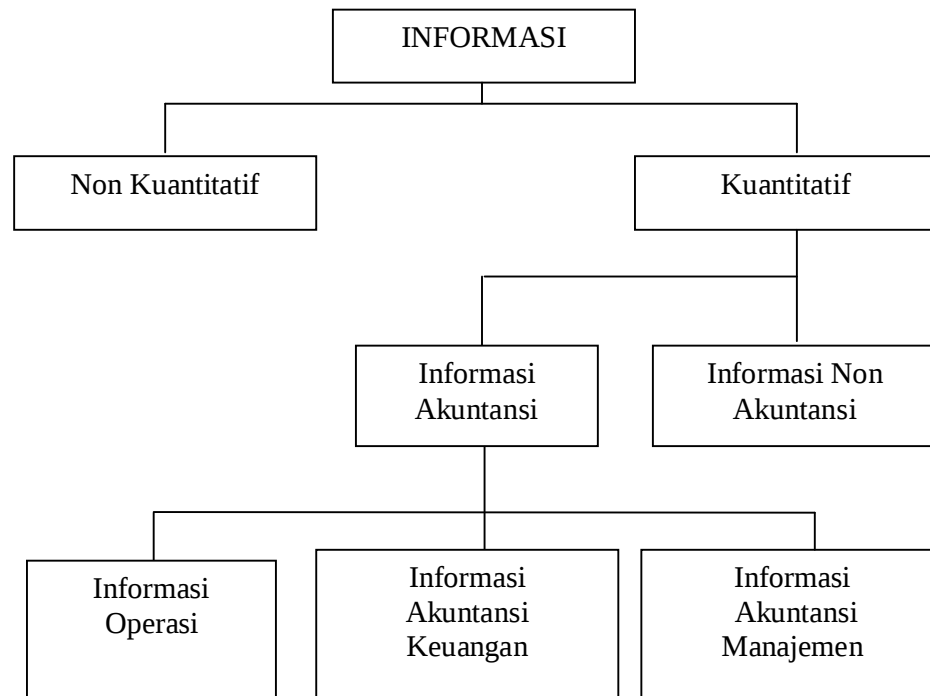
2) Informasi

Menurut Jogiyanto (11:1995) informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang.

Menurut Mulyadi (11:1997) informasi merupakan suatu fakta, data, pengamatan, persepsi atau sesuatu yang lain, yang menambah

pengetahuan. Berdasarkan beberapa pendapat diatas disimpulkan bahwa informasi meliputi unsur-unsur data, pengolahan data menambah pengetahuan dan dasar pembuatan keputusan saat sekarang atau masa yang akan datang. Secara rinci bentuk informasi dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
Bentuk Informasi



Sumber: Mulyadi (1997:12)

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Nugroho ((14:2001) Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang menitikberatkan penggunaan komputer dan teknologi yang berhubungan dengan pengaturan sumber informasi. Selain itu teknologi informasi didefinisikan sebagai teknologi yang digunakan

untuk memperoleh, memanipulasi, mengkomunikasikan, menyajikan dan memanfaatkan data. Definisi ini dibatasi pada teknologi informasi yang didukung oleh komputer.

Pemanfaatan teknologi informasi menurut Davis (1989) didefinisikan sebagai tingkat keyakinan individu bahwa penggunaan teknologi informasi tertentu akan meningkatkan kinerjanya. Konsep ini menggambarkan manfaat sistem bagi pemakainya yang berkaitan dengan produktivitas, kinerja tugas, efektivitas, dan pentingnya suatu tugas. Menurut Arif (2007) dimensi kemanfaatan terdiri dari dimensi kegunaan yaitu menjadikan pekerjaan lebih mudah, bermanfaat, serta menambah produktivitas. Sedangkan dimensi efektivitas yaitu mempertinggi efektivitas dan mengembangkan kinerja pekerjaan. Hal ini menegaskan pemanfaatan teknologi yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan dikarenakan produktivitas dan kinerja yang meningkat.

Menurut Jurnal dan Supomo (2002:214) pemanfaatan teknologi adalah tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. Pemanfaatan tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi terdiri dari, yaitu:

- 1) Bagian akuntansi keuangan memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas.
- 2) Jaringan internet telah terpasang di unit kerja.

- 3) Jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan.
- 4) Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.
- 5) Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6) Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi.
- 7) Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur
- 8) Peralatan yang usang/rusak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya.

Menyangkut pemanfaatan teknologi dalam menghasilkan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah, hal ini didasarkan kepada semakin meningkatnya total volume APBN/D dari tahun ketahun. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin kompleks dan rumit. Menurut Sugijanto (2002:56), peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks tentu harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah. Untuk itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk hal pembuatan pelaporan keuangan dalam rangka menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatuf dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang informasi keuangan daerah. Sedangkan menurut Widjajanto (2001:89) secara umum manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan membantu dalam penyiapan laporan.

Menurut Gazali, 2004 (dalam Sidik, 2008) mengemukakan keunggulan dan kelemahan dari teknologi informasi, sebagai berikut:

- (1) Keunggulan teknologi informasi.
 - a) Tepat waktu dan akurat
 - b) Dengan penggunaan sistem informasi berbasis komputer maka hasil ouputnya dalam bentuk informasi dapat disajikan tepat waktu dan data yang didapat akurat.
 - c) Untuk pengambilan keputusan

Teknologi informasi memberikan kemudahan bagi manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan karena prosesnya cepat.

d) Digunakan untuk berbagai integrasi

Teknologi informasi dapat digunakan untuk kerja baik itu integrasi vertikal maupun horizontal.

e) Memperoleh informasi yang kompetitif

Teknologi informasi dapat membantu perusahaan dalam memperoleh informasi yang kompetitif.

f) Informasi yang bermanfaat

Teknologi informasi menyajikan informasi dalam bentuk yang berguna dan dapat digunakan untuk mengirim informasi ke orang lain atau ke lokasi lain.

g) Penyajian data cepat.

Teknologi informasi mengintegrasikan data dari berbagai bagian, mengurangi pekerjaan klerikal dan mempercepat penyajian data yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

(2) Kelemahan teknologi informasi.

Kelemahan dari teknologi informasi adalah apabila terjadi suatu kesalahan dalam pengelolaan data akan berakibat fatal bagi informasi yang disajikan. Oleh karena itu harus ada sistem *protection* yang kuat untuk melindungi dokumen-dokumen penting dan adanya

pembatasan akses terhadap suatu jaringan. Maka diperlukan orang tertentu yang bisa dipercaya untuk menjaga kerahasiaan perusahaan dan dibutuhkan biaya yang besar untuk penerapan sistem perlindungan tersebut.

Peran teknologi informasi semakin penting dikarenakan kita sudah memasuki era informasi (*information age*). Era informasi, komputer digital dan jaringan (*network*) mengubah konsep ekonomi yang tidak mengenal ruang dan waktu sehingga timbul istilah *digital network*, *economy network*. Kesuksesan penggunaan teknologi informasi sangat tergantung pada teknologi itu sendiri dan tingkat keahlian individu yang mengoperasikannya. Adanya keahlian yang memadai dari personil EUC (*End-User Computing*) menyebabkan aktivitas EUC yang antara lain berupa pengolahan data (*Work Processing*), komunikasi elektronik (*elektronik Communication*) dan aktivitas otomatisasi lainnya yang dapat berjalan dengan baik sehingga aplikasi teknologi yang berbasis komputer dapat memberikan manfaat.

Dengan demikian hal diatas menjelaskan pemanfaatan teknologi informasi yang baik dengan keahlian yang baik oleh para pengguna akan memberikan peningkatan baik pula dalam kinerja pemerintahan, dalam hal ini kita lihat melalui laporan keuangan pemerintah.

3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006, Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah

“suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah”.

Sementara itu dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2008, pengertian Sistem Pengendalian Intern adalah:

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Dalam PP No 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

b. Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Sedangkan dalam PP No 60 Tahun 2008, tujuan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah:

1. Memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah.
2. Keandalan pelaporan keuangan.
3. Pengamanan aset negara.
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

c. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern

Dalam PP No 60 Tahun 2008, unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Pemerintah mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara. Penerapan unsur ini dilaksanakan dengan maksud untuk menyatukan dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah, yang meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi yang akan mempengaruhi efektivitas pengendalian. Kondisi lingkungan kerja dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu adanya penegakan integritas dan etika seluruh anggota organisasi, komitmen pimpinan manajemen atas kompetensi, kepemimpinan manajemen yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang

pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan yang efektif dan hubungan kerja yang baik dengan pihak ekstern.

Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk mendukung terhadap sistem pengendalian intern dan manajemen yang sehat. Lingkungan pengendalian mencakup:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika.
- b. Komitmen terhadap kompetensi.
- c. Kepemimpinan yang kondusif.
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- e. Pendelagasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.

Penilaian risiko terdiri atas:

- a. Identifikasi risiko.
- b. Analisis risiko.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arah pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi serta sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi suatu instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian terdiri atas:

- a. Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.
- b. Pembinaan sumber daya manusia.
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.
- d. Pengendalian fisik atas aset.
- e. Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja.
- f. Pemisahan fungsi.
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting.
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.
- i. Pembatasan akses dan sumber daya dan pencatatannya.
- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya.
- k. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu yang diselenggarakan secara efektif sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya. Untuk menyelenggarakan sistem informasi yang efektif pimpinan instansi pemerintah harus:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi;
- b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat segera ditindak lanjuti. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut hasil rekomendasi audit dan review lainnya

B. Penelitian Relevan

Penelitian Fardila (2008), yang meneliti mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada pemerintahan kota Padang, hasil penelitian

menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang secara implisit belum mampu menerapkan SAP, hal ini dapat dilihat dari banyaknya Dinas di Kota Padang yang belum selesai dalam menyusun laporan keuangan. Serta adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemko Padang.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan masih lemahnya kualitas laporan keuangan dari pemerintah, karena pemerintah belum sepenuhnya menerapkan SAP dalam penyusunan laporan keuangan, dan masih lemahnya penerapan sistem pengendalian intern dalam pemerintahan.

Selain itu penelitian Siska (2009) yang meneliti mengenai Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi BPKP Provinsi Sumatera Barat), dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah.

Penelitian Ratih (2010) yang meneliti mengenai Pengaruh Penerapan *Good Governance (GG)* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Good Governance (GG)* dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah.

Ayomi (2008) melakukan penelitian yang menguji Analisis Manfaat Laporan Pengendalian Internal dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan. Dalam penelitian Ayomi bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh manfaat laporan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif secara statistik antara manfaat laporan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Celviana (2009), yang meneliti tentang pengaruh sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi pada pemda subosukawonosraten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh signifikan negatif terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.

C. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan Pemanfaatan teknologi dengan Kualitas laporan keuangan

Sesuai yang diungkapkan dalam PP No. 24 Tahun 2005, laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi 4 karakteristik. Karakteristik pertama, dapat dipahami yaitu di mana informasi yang disajikan dapat

dipahami oleh pengguna laporan keuangan, Karakteristik kedua, relevan sangat berarti untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Karakteristik ketiga, keandalan mengandung arti bahwa informasi seharusnya bebas dari kesalahan yang material dan bias, serta dapat menyajikan informasi kepada pengguna secara jujur. Karakteristik keempat dapat dibandingkan, mengandung arti bahwa pemakai laporan dapat membandingkan laporan keuangan antar periode. Namun demikian, perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum, laporan keuangan menggambarkan pengaruh dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Pemanfaatan tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi terdiri dari, yaitu:

- 1) Bagian akuntansi keuangan memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas.
- 2) Jaringan internet telah terpasang di unit kerja

- 3) Jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan.
- 4) Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.
- 5) Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan *software* yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6) Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi.
- 7) Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur
- 8) Peralatan yang usang/rusak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya.

Dengan pemanfaatan teknologi diatas maka akan tercipta keamanan data yang lebih baik, sehingga dalam pembuatan laporan keuangan akan lebih bagus jika penggunaan teknologi tersebut sesuai dengan alur yang telah ditetapkan. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin kompleks dan rumit.

Penjelasan tersebut menggambarkan keunggulan dari pemanfaatan sistem informasi yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, karena laporan keuangan yang berkualitas seperti yang dijelaskan dalam PP nomor 24 mengharuskan laporan keuangan tersebut handal, dapat dibandingkan, tepat waktu, dan akurat yang mana keempat kriteria laporan keuangan yang berkualitas tersebut dapat dicapai melalui pemanfaatan teknologi dengan baik

seperti yang dijelaskan oleh M. Gazali (2004) mengenai keunggulan dari pemanfaatan teknologi informasi.

Hal tersebut menggambarkan pentingnya pemanfaatan teknologi, karena dengan adanya teknologi data-data yang digunakan dalam pembuatan laporan keuangan lebih mudah disusun, hal ini menunjukkan adanya hubungan yang erat dari pemanfaatan teknologi dalam menciptakan kualitas laporan keuangan yang baik.

2. Hubungan SPI dengan Kualitas laporan keuangan

Laporan keuangan merupakan alat pertanggung jawaban pemerintah kepada publik. Sebelum diserahkan kepada publik laporan keuangan tersebut diaudit terlebih dahulu oleh BPK. Dalam hal ini BPK melihat apakah kualitas laporan keuangan itu baik atau harus dikoreksi. Menurut Kepala BPK perwakilan Sumatera Barat Dalam pemberian opini dalam hal ini melihat kualitas laporan keuangan BPK didasari oleh 4 hal yaitu :

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
2. Kecukupan Pengungkapan (*Adequate Disclosures*)
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

Dapat kita lihat efektivitas SPI mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang menjadi alat pertanggungjawaban.

Selain itu Penyebab Opini WTP tidak diberikan oleh BPK sebagian besar disebabkan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) atas laporan keuangan pemerintah daerah:

1. Belum memadainya pengendalian fisik atas aset, kelemahan manajemen kas, pencatatan transaksi yang belum akurat dan tepat waktu serta masalah disiplin anggaran.
2. Kelemahan SPI yang sering terjadi terutama dalam pengendalian aset tetap seperti nilai aset tetap tidak dikapitalisasi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan, perbedaan pencatatan antara saldo aset tetap pada neraca dengan dokumen sumber dan penyajian aset tetap tidak didasarkan hasil inventarisasi dan penilaian.
3. Kelemahan SPI lainnya antara lain : pengelolaan kas belum tertib, nilai persediaan yang dilaporkan tidak berdasarkan inventarisasi fisik, pencatatan penyertaan modal pemerintah dan dana bergulir tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, realisasi belanja yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dan peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah belum dibuat.

Hal diatas menggambarkan hubungan antara penerapan SPI di Pemerintah dengan Kualitas laporan keuangan, kerena jika tujuan dari penerapan SPI tercapai maka akan tercapai pula kualitas laporan keuangan yang baik, hal ini memperlihatkan hubungan yang erat dari penerapan SPI dengan kualitas laporan keuangan.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah. Kerangka konseptual menggambarkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Dengan pemanfaatan teknologi maka akan tercipta keamanan data yang lebih baik, sehingga dalam pembuatan laporan keuangan akan lebih bagus jika penggunaan teknologi tersebut sesuai dengan alur yang telah ditetapkan. Menyangkut pemanfaatan teknologi dalam menghasilkan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah, hal ini didasarkan kepada semakin meningkatnya total volume APBN/D dari tahun ketahun. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin kompleks dan rumit.

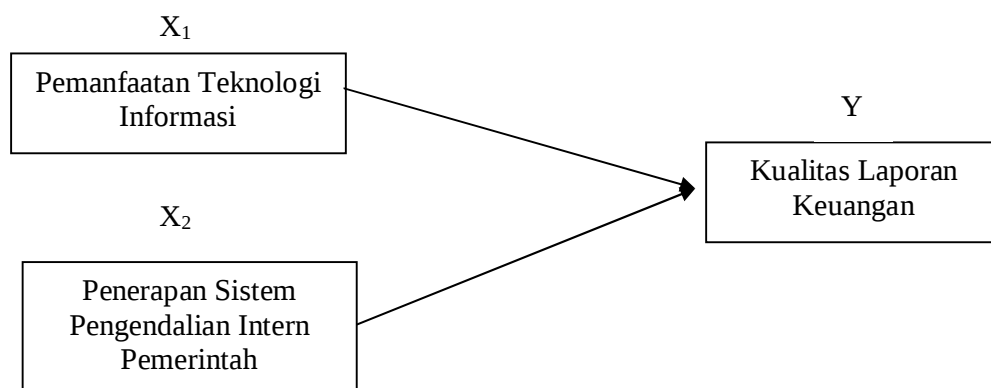
Sistem pengendalian intern pemerintah adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern pemerintah juga menentukan kualitas laporan keuangan yang baik. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan

laporan keuangan. Salah satu unsur-unsur dalam sistem pengendalian intern pemerintah adalah penilaian resiko dan informasi dan komunikasi.

Dalam penilaian resiko untuk pelaporan keuangan adalah tindakan manajemen yang mengidentifikasikan dan menganalisis resiko-resiko yang relevan dalam penyusunan laporan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP). Sedangkan dalam informasi dan komunikasi harus disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu yang diselenggarakan secara efektif sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya. Jadi semakin baik penerapan sistem pengendalian intern pemerintah akan semakin baik pula kualitas penyajian laporan keuangan yang didapatkan.

Berdasarkan uraian teori dan pengembangan hipotesis di atas maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut

Gambar 2. Kerangka Konseptual



E. Hipotesis

Berdasarkan teori dan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat dibuat beberapa hipotesis terhadap permasalahan sebagai berikut:

- H₁ : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
- H₂ : Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.
2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.

B. Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Dimana dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 20,5%. Sedangkan 79,5% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sehingga variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Penelitian ini merupakan metode survei menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. Sebaiknya dalam mengumpulkan data dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis.

C. Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern dalam pemerintahan telah baik dilakukan, tapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna sehingga hal ini berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah. Pemerintah sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintahan dalam pembuatan laporan keuangan agar kualitas laporan keuangan dari pemerintah dapat terus ditingkatkan.
2. Penelitian ini masih terbatas pada pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah.

3. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu di mana staf akuntansi SKPD dalam kenyataannya belum sepenuhnya atau belum maksimal dalam membuat laporan keuangan SKPD, namun pada jawaban responden mereka telah mampu melakukannya. Jadi dalam penelitian ini masih terdapat kelemahan yaitu ada beberapa responden yang mengisi kuesioner penelitian yang tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya, maka untuk penelitian selanjutnya dapat disertai dengan penelitian kualitatif dan penggantian teknik pengambilan sampel penelitian, serta dilakukan perubahan dalam pemilihan alternatif jawaban pada kuesioner penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aren, Alvin A, Randal J, Beasley, dan Mark S. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance*. Edisi Keduabelas. Jakarta: PT Indeks IKAPI
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- _____. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Atika, Ratih. 2010. Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang.
- Ayomi, Rindang Sri. 2008. Analisis Manfaat Laporan Pengendalian Internal dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan. *Thesis* Bandung: FE-UGM
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Celviana, Winidyaningrum 2009. pengaruh sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian inter akuntansi pada pemda subosukawonosraten. (www.sna13purwokerto.com)
- Chandra, Ruslan Andy. 2008. Hasil Pemeriksaan BPK Mendukung Good Governance. Melalui (www.kabarindonesia.com) [21/06/2009]
- Darman, Siska. 2009. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi: BPKP Provinsi Sumatera Barat). *Skripsi*. Padang. FE UNP
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar. 1999. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Harahap, Syofyan Syafri. 2007. *Teori Akuntansi*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Hendriksen, Eldon. 1982. *Accounting Theory 4th edition*. Jakarta : Erlangga.

- Indianto, Nur Dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE UGM
- Jogyanto, HM. 1995. *Analisis Dan Desain Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur Teori Dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Andi offest. Yogyakarta.
- Jones, gregory. Jeanot, Blanchet. 2000. *Assensing Quality of Finnancial Reporting, Accounting Horizons*, Vol.14. Nomor 3.
- Jurnali, Teddy & Bambang Supomo. 2002. "Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas Teknologi Dan Pemanfaatan Ti Terhadap Kinerja Akuntan Publik", Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Vol. 5 No. 2 hal. 214
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Mulyadi. 1997. *Akuntansi Manajemen Konsep, Biaya, Manfaat Dan Rekayasa*. Yogyakarta: STEI YKPN.
- Salam, Dharma Setyawan. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Standar Akuntansi Pemerintahan*. 2006. Jakarta: Sinar Grafika
- Soewardjono. 2005. *Teori Akuntansi*. Yogyakarta: BPFE
- Sugijanto . 2002. *Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Dan Implikasi UU No. 22/25 Tahun 1999*. Lintasan Ekonomi Volume Xix Nomor 1 Hal. 50-56
- Sugiyono. 2008. *Metode Peneliatian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Umar, Husein. 2005. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Wahyono, Teguh. 2004. *Sistem Informasi Akuntansi, Desain Dan Pemograman Komputer*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Warsoko, Soesanto. 2007. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Akuntansi Pada Implementasi Basis Data PFAMS*. Padang: Jurnal FE Unand. Volume 11. Nomor 4.
- Widjajanto, Nugroho. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.

Dokumen dan Literatur Penunjang

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Melalui (www.google.com) [07/01/2009]

_____, Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui (www.google.com) [07/01/2009]

_____, Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Melalui (www.google.com) [07/01/2009]

_____, Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem informasi Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Melalui (www.google.com) [07/01/2009]

_____, Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Melalui (www.google.com) [07/01/2009]

_____, Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara. Melalui (www.google.com) [07/01/2009]

_____, Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Melalui (www.google.com) [07/01/2009]

_____, Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Melalui (www.google.com) [07/01/2009]